



## Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Tahun Pelajaran 2022/2023

Alifia Taufika Rahmah<sup>1</sup>, Sita Ratnaningsih<sup>2</sup>, Nurochim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup>Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>3</sup>Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, 15121

Volume 7 Nomor 2  
Oktober 2023: 321-338  
DOI: 10.30997/jtm.v7i2.9711

### Article History

*Submission: 27-07-2023*

*Revised: 30-09-2023*

*Accepted: 25-10-2023*

*Published: 31-10-2023*

### Kata Kunci:

Pengelolaan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Raudhatul Athfal.

### Keywords:

*Management, Education Operational Costs (BOP), Raudhatul Athfal.*

### Korespondensi:

(Alifia Taufika Rahmah)

(089612142131)

(alifiataufika.rahmah22@mhs.uinjkt.ac.id)

**Abstrak:** Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya dukungan dari pusat, daerah dan masyarakat. Dengan itu, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD. Namun, dalam penyelenggaraannya, pemberian BOP dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan riil siswa. Kenyataan tersebut disebabkan besaran dana BOP hingga tahun 2020 belum berubah dan belum mengikuti berbagai kondisi perekonomian (inflasi). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan biaya operasional pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor khususnya pada tahun pelajaran 2022/2023. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan biaya operasional pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor berjalan dengan baik, karena adanya proses perencanaan dengan mengadakan perkumpulan antara kepala sekolah, tata usaha, guru dan komite sekolah untuk membuat anggaran kegiatan selama satu tahun kedepan serta mengumpulkan syarat-syarat untuk mencairkan Bantuan Operasional Pendidikan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya sumber dana yang diterima baik dari pemerintah dan dari orang tua siswa sudah dialokasikan dengan baik. BOP ini diawasi oleh kepala sekolah, dewan guru dan ketua yayasan sebagai pengawas internal serta pengawas dari kecamatan sebagai pengawas eksternal.

*Management of Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Education Operational Costs for the 2022/2023 Academic Year*

**Abstract:** *Early Childhood Education as an educational institution to educate the life of the nation needs support from the central, regional and community levels. With that, the government launched the PAUD Education Operational Assistance (BOP) program. However, in practice, it is felt that the provision of BOP is no longer relevant to the real needs of students. This fact is due to the amount of BOP funds until 2020 has not changed and has not followed various*



*economic conditions (inflation). This study aims to describe the management of the operational costs of Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor's education, especially in the 2022/2023 school year. This type of research uses qualitative data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study prove that the management of the operational costs of the Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor education is going well, because there is a planning process by holding an association between school principals, administration, teachers and school committees to make an activity budget for the next one year and collect requirements for disbursing Educational Operational Assistance from the government. In practice, the sources of funds received from both the government and parents of students have been allocated properly. This BOP is supervised by the school principal, teacher council and the chairman of the foundation as internal supervisors and supervisors from the sub-district as external supervisors.*

---

## PENDAHULUAN

Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dengan cara pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Ahmad Mushlih et al. 2018:24).

Terselenggaranya Raudhatul Athfal berawal dari pendidikan non formal yang mempunyai peran dalam membantu pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak usia dini, baik dari sarana prasarana, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini (Rozalena and Kristiawan 2017:76).

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 53 Ayat (1) bahwa "Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal di daerah terpencil".

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit menghendaki adanya penjaminan mutu pendidikan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Dengan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk PAUD (Heru, Winarsih, and Karsiaty 2019:2).

Menurut Ma'arif, pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan yang dapat membedakan manusia dengan binatang. Binatang juga "belajar", tetapi lebih ditentukan oleh insting. Sementara, manusia belajar guna menuju kehidupan yang lebih berarti (Restian and Widodo 2019:14). Dan pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara, maka dari itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu (Heru et al. 2019:2).

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya dukungan dari pusat, daerah dan masyarakat. Selain itu, pendidikan dasar juga bertujuan untuk memberikan kemampuan membaca, menulis dan berhitung, serta menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya (J Shaturaev 2021:2).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mencukupi kebutuhan operasional satuan pendidikan anak usia dini. Dengan itu, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD. Namun, dalam penyelenggaraannya, pemberian BOP dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan riil siswa. Kenyataan tersebut disebabkan besaran dana BOP hingga tahun 2020 belum berubah dan

belum mengikuti berbagai kondisi perekonomian (inflasi) (Pratiwi et al. 2021:1).

Program ini dinamakan dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD), untuk meringankan pembiayaan pendidikan pada anak usia dini. Selain itu, dana tersebut juga berfungsi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti sarana dan prasarana yang memadai.

Dana Aloksi Khusus Non Fisik BOP PAUD harus digunakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang saat ini telah diubah menjadi Permendikbud 20 tahun 2020.

Petunjuk Teknis DAK Non fisik BOP PAUD selalu diperbaharui pemerintah satu tahun sekali, agar pengelolaan dana tersebut selalu lebih baik dan terhindar dari penyimpangan. Berdasarkan artikel yang penulis temukan mengatakan bahwa masih

adanya korupsi dan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah.

Selain itu, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan masih ada beberapa yayasan sekolah yang belum menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik. Sebagian besar masalah ini terjadi karena terbatasnya sumber daya, anggaran yang dimiliki serta kurangnya pemahaman pengelola dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD.

Ada beberapa ketentuan petunjuk teknis dalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah. Salah satunya harus menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi agar tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan atau penyelewengan serta dana yang tersedia dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Larasati and Handayani 2021:2).

Salah satu PAUD di Kabupaten Bogor yakni Raudhatul Athfal Nurul Huda merupakan suatu lembaga pendidikan, yang biaya pendidikannya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaporan keuangan

harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui pengelolaan biaya operasional pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda, khususnya pada tahun pelajaran 2022/2023.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Dr. Rukin 2021). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan analisisnya terhadap fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial. Pada Raudhatul Athfal Nurul

Huda yang terletak di Jl. Perum Bambu Kuning 8, Blok C5, No. 09, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor 16922.

Penelitian ini memperoleh data-data primer melalui observasi melakukan kunjungan ke lokasi penelitian, wawancara dengan salah satu informan di lokasi penelitian yaitu Ibu Irma sebagai Kepala Sekolah dan studi dokumentasi yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dan sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena kegiatan pengelolaan ini hanya dapat dipaparkan dengan narasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data (Prof. Dr. Dede Rosyada 2020).

### **HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Biaya Operasional**

Biaya operasional sebagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikaitkan dengan

kegiatan produksi pokok atau *core business*. Dalam penyelenggaraan sekolah, produksi utama sekolah adalah kegiatan belajar mengajar. Artinya, bagus atau tidaknya pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana biaya yang ada dapat mendukung terjadinya layanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang efektif (Papilaya 2022:3).

Biaya operasional pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki, program-program atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai target yang telah ditentukan (Ariesa et al. 2020:2690). Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Irma bahwa biaya pendidikan untuk RA ini dapat dikelola sesuai kebutuhan sekolah kami.

Penyelenggara pendidikan akan menyangkut terhadap tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan (Papilaya

2022:4). Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Qhoimah and Munastiwi 2022:427). Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar.

Berikut jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*), yaitu biaya

rutin (*recurrent cost*) yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain (Nanang Fattah 2008:271-72).

Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Papilaya 2022:5). Berikut jenis biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu (Nanang Fattah 2008:272):

1. Biaya pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu.
2. Biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk

membiayai sekolah (didalamnya termasuk biaya pribadi). Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan (Tarmizi 2015:95).

Adapun sumber biaya operasional pendidikan dapat diperoleh dari:

### 1. Pemerintah Pusat

Melihat betapa pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia maka diterbitkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 "Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah

(APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional (Ridwan and Sakdiyah 2022:21).

Hal ini dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang disebut dengan 5 (lima) K, yaitu: Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan layanan pendidikan, Kualitas dan relevansi layanan pendidikan, Kesetaraan layanan pendidikan dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan (Ridwan and Sakdiyah 2022:21).

Biaya Operasional Pendidikan Rudhatul Athfal ini disebut dengan BOPRA. BOPRA ini diturunkan setiap tahun, dengan dua kali angsuran yaitu di semester ganjil dan semester genap. Adapun jumlahnya sebesar Rp.600.000,- per anak dalam satu tahun.

Hal ini dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan dana secara pasti yang digunakan untuk penyelenggaraan

pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga dana yang dialokasikan tersebut dicicil secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen peningkatan alokasi setiap tahunnya (Ridwan and Sakdiyah 2022:22).

Pernyataan ini juga ditegaskan dengan penelitian Vina Adriany bahwa pada tahun 2013 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar US\$ 40 per anak dalam satu tahun, untuk menutupi biaya operasional seorang anak di organisasi PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD) (Adriany, Yulindrasari, and Tesar 2020:67).

Selain dana BOS, bantuan rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, digolongkan menjadi jenis bantuan sosial di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan seperti beasiswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Ridwan and Sakdiyah 2022:22).

## 2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 20, 2003



pasal 47, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan mendapat alokasi dana 20% dari APBN dan APBD. Penggunaan dana pendidikan juga telah diatur dalam UU No. 20, 2003 pasal 48 dan 49 tentang pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan juga didapatkan dari APBN dan APBD (Ridwan and Sakdiyah 2022:22).

Dalam penggunaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ridwan and Sakdiyah 2022:23).

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Irma bahwa pemerintah daerah Bogor mengeluarkan bantuan untuk guru yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

(BOSDA). Namun bantuan ini, tidak rutin setiap tahun diturunkan untuk semua guru yang ada di Raudhatul Athfal Nurul Huda.

Alokasi dana pendidikan, dinyatakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinyatakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada era sentralisasi di masa lalu, sebagian besar dana pendidikan yang ada pada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah daerah hanya mengelola dan menyalurkannya sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ridwan and Sakdiyah 2022:23).

### 3. Orang Tua Siswa

Pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa, biasa disebut

dengan pengeluaran keluarga atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan. Adapun SPP RA Nurul Huda sebesar Rp. 200.000,-. Selain itu, komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa yaitu uang pangkal, pembelian buku pelajaran, pembelian seragam sekolah dan lain sebagainya sebesar Rp. 1.900.000,- (Safitri 2020:4-5).

## **B. Fungsi Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan**

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, perlu dibangun rasa saling percaya antara lingkungan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan efektivitas pembiayaan pendidikan dapat tercapai (Surur et al. 2020:1998).

### **1. Perencanaan Biaya Pendidikan**

Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan

sebelumnya untuk dilakukan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mempunyai urgensi tersendiri, maka dibutuhkan manajemen pembiayaan agar mampu mendapatkan sumber pendanaan, mengelola dan mengalokasikannya dalam sebuah kegiatan pendidikan (T. M. Haekal et al. 2022:136-37).

Proses perencanaan biaya operasional pendidikan atau anggaran pendidikan selama satu tahun ini dilakukan dengan mengadakan perkumpulan antara kepala sekolah, tata usaha, guru dan komite sekolah. Perencanaan anggaran ini ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek semisal untuk rehabilitas pembangunan, pembelian meja dan bangku. Jangka menengah semisal untuk manasik haji, aksera dan lain

sebagainya. Dan jangka panjangnya semisal untuk acara pelepasan dan kenaikan tingkat.

BOPRA sebagai salah satu sumber biaya pendidikan hanya bisa dialokasikan untuk rehabilitas sekolah, perlengkapan sarana seperti permainan anak atau media pembelajaran anak lainnya. Selain itu, bisa juga 30% nya dialokasikan untuk gaji guru. Intinya BOPRA ini hanya boleh digunakan untuk memenuhi aset sekolah atau sarana pembelajaran, bukan untuk modal jual beli barang siswa (Irma 2023).

BOPRA ini dicairkan 1 Tahun 2 kali, dengan mempersiapkan rincian anggaran semester, surat pencairan, data anak dan lain sebagainya yang ditanda tangani oleh pengawas, komite dan ketua yayasan. Lalu, dikumpulkan ke pengurus RA Kecamatan Bojong Gede. Selanjutnya, akan diberi kwitansi bermaterai dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor (Irma 2023).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa pembayaran madrasah tingkat

pendidikan dasar baik negeri maupun swasta disalurkan melalui Kanwil Depag. Setelah memperhitungkan biaya-biaya tersebut, Kemenag memberikan berbagai bentuk dukungan keuangan kepada madrasah swasta dengan pertimbangan pengalokasiannya (Jakhongir Shaturaev 2021:63).

BOPRA ini istilah lain dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk Raudhatul Athfal yang merupakan dana bantuan dari pemerintah agar tercapainya mutu pendidikan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat (Trihantoyo 2020:24).

Biaya Pendidikan juga berasal dari SPP sebesar Rp. 200.000,- per anak. Ini semua sudah meliputi kegiatan berenang, masak, sains project dan outbound. Terkadang, diadakan juga kegiatan seminar parenting dan membuat (Irma 2023). Selain itu, ada bantuan dari Bupati Bogor untuk guru yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

## 2. Pelaksanaan Biaya Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biaya pendidikan ini merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Prof. DR. H. A. Rusdiana and Drs 2022:9).

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah

dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah (Prof. DR. H. A. Rusdiana and Dr. H. Abdul Kodir 2022:6-7).

Setelah anggaran kegiatan dalam satu pelajaran disusun, selanjutnya melakukan pencairan dana. Adapun pencairan BOPRA dilakukan 1 tahun pelajaran 2 kali, yaitu di semester ganjil pada Bulan Juni sebesar Rp. 22.200.000,- dan semester genap pada Bulan Januari sebesar Rp. 22.200.000,- untuk 74 siswa dengan membawa kwitansi bermaterai ke Bank Mandiri sesuai hari dan waktu yang telah ditentukan (Irma 2023).

Sedangkan BOSDA dapat dicairkan oleh guru, tergantung kuota yang tersedia di kabupaten jadinya tidak semua guru dapat tunjangan dari BOSDA setiap tahunnya. Pemerintah mengambil nama guru yang mendapatkan tunjangan berawal dari data guru di EMIS dengan beberapa syarat

diantaranya adalah minimal S1, sudah 2/4 tahun mengajar di sekolah tersebut dan minimal berusia 22 tahun. BOSDA ini dapat dicairkan dengan cara sekolah memberikan nama guru ke panitia Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kecamatan Bojong Gede. Dan tidak semuanya sekolah dapat BOSDA, khususnya di kecamatan Bojong Gede ada 60 sekolah dan sekolah tersebut dapatnya bergilir sesuai ketentuan dari pemerintah. Tahun ini hanya 40 sekolah yang mendapatkan BOSDA. Pencairan BOSDA ini, diajukan secara online dengan men-scan berkas-berkas. Lalu, akan dikabarkan melalui whatsapp group, terkait jadwal pengambilan BOSDA. Tunjangan ini didapatkan sebesar Rp.1.425.000,- sudah dipotong pajak sebesar Rp. 75.000,-. Setelah itu, bisa langsung diambil oleh masing-masing guru di Bank terdekat dengan syarat membawa bukti pendapatan yang ada di aplikasi serta laporan pertanggung jawaban (Irma 2023).

Selain pelaksanaan biaya

pendidikan yang bersumber dari pemerintah, ada uang yang dibayarkan kepada penyedia jasa. Uang tersebut merupakan biaya pendidikan dan biaya pendaftaran (Utami and Wandebori 2023:52). Berikut rincian biaya pendaftaran RA Nurul Huda.

*Tabel 1 Rincian Biaya Pendaftaran*

Keterangan	Jumlah
Uang Gedung	Rp. 950.000,-
SPP Bulan Juli	Rp. 200.000,-
Uang Seragam	Rp. 500.000,-
Perlengkapan Sekolah (1 Tahun)	Rp. 450.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 2.100.000,-</b>

Perlengkapan sekolah selama 1 tahun ini dialokasikan untuk kegiatan Tahun Baru Islam, 17 Agustus dan Kegiatan Bulan Ramadhan. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membayar kegiatan Aksera sebesar Rp.180.000,- per anak untuk biaya transportasi dan pendaftaran. Dari pendaftaran ini sudah mendapatkan piala, kaos, sertifikat dan lain sebagainya. Namun, kegiatan ini hanya difokuskan kepada anak Kelas B. Yang tidak ikut, tetap dimintain biaya

partisipasi sebesar Rp. 20.000,- dan Rp 5.000,- untuk hadiah-hadiah anak seperti botol minum. Kegiatan ini diselenggarakan di Pusdiklat Bilabong pada Bulan Februari.

Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti manasik haji khususnya Kelas B, dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- per anak. Dan ini sudah termasuk biaya anak dan orang tua, baik dari kursi bus, tiket manasik haji dan snack. Acara ini diselenggarakan di Pondok Gede. Dan lanjut ke Marcopolo untuk berenang.

### **3. Pengawasan Biaya Pendidikan**

Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah ditentukan. Pengawasan penggunaan dana pendidikan dapat diartikan dengan memperhatikan, melihat, menilai dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar

anggaran tersebut dapat digunakan sebagaimana semestinya secara baik, efisien dan efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Effendi (2019) yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah yang bersumber dari masyarakat menghasilkan temuan. Penelitian ini menjelaskan ada dua jenis pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri yaitu kepala sekolah dan komite sekolah yang ditunjuk dari tokoh masyarakat. Sedangkan, pengawas eksternal dilakukan oleh pihak pemerintah yakni dinas pendidikan dan inspektorat kabupaten (T. M. Haekal et al. 2022:178-79).

Pengawasan internal pengelolaan biaya operasional madrasah ini biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat pertiga bulan, persemester dan pertahun bersama kepala sekolah dan dewan guru yang diawasi oleh ketua

yayasan. Sedangkan, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh pengawas dari kecamatan minimal 1 Tahun 1 kali (Irma 2023).

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa pengawasan merupakan bagian dari evaluasi dengan cara mengumpulkan data kemudian melakukan analisis. Dengan demikian, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dana BOS menjadi penting dan strategis untuk menentukan tingkat pelaksanaan serta alternatif pemecahan masalah program untuk tahun selanjutnya. Sebagian besar sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS) juga telah sesuai dengan juknis program dana BOS dan telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain guru, bendahara, kepala sekolah dan komite (Sutanto, Restyaningati, and Kusindarto 2021:2911).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa biaya operasional Raudhatul Athfal Nurul Huda berjalan dengan baik, karena adanya pengelolaan atau manajemen terkait anggaran sekolah, khususnya pada tahun pelajaran 2022/2023 mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan biaya operasional pendidikan ini dilakukan dengan cara perkumpulan antara kepala sekolah, tata usaha, guru dan komite sekolah untuk membuat anggaran kegiatan selama satu tahun kedepan serta mengumpulkan syarat-syarat untuk mencairkan Bantuan Operasional Pendidikan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, biaya operasional pendidikan baik BOPRA itu dialokasikan untuk rehabilitas sekolah, perlengkapan sarana seperti permainan anak atau media pembelajaran anak lainnya. Selain itu, bisa juga 30% nya dialokasikan untuk gaji guru. Sedangkan BOSDA hanya dialokasikan untuk tunjangan guru. Biaya pendidikan di RA Nurul Huda ini juga dapat diperoleh dari SPP dan iuran

orang tua siswa untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, seperti berenang, outbound, manasik haji dan lain sebagainya.

Segala anggaran yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan ini, diawasi oleh pengawas internal yaitu kepala sekolah, dewan guru dan ketua yayasan. Sedangkan, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh pengawas dari kecamatan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini, baik dari dosen yang telah memberikan bimbingan, narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan teman-teman seperjuangan yang selalu motivasi. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriany, Vina, Hani Yulindrasari, and Marek Tesar. 2020. "Satu Desa , Satu PAUD - One Village, One Centre Unpacking the Meaning of Children' s." *The Routledge International Handbook of Young Children's Rights* (January):66-76.
- Ahmad Mushlih, S. P., S. P. Hj. Rahimah, S. P. Ma'fiyatun Insiyah, S. P. Muzdalifah, S. P. Ajeng Ninda Uminar, S. P. Fildzah Imami, S. P. Inayatul Maula, S. P. Asmidar Parapat, S. P. Puti Lestari, and S. P. Lina Khairunnisa. 2018. *Analisis Kebijakan PAUD: Mengungkap Isu-Isu Menarik Seputar AUD*. Penerbit Mangku Bumi .
- Ariesa, Yeni, Della, Panny Fransiska, and Sonia Falensia. 2020. "The Effect of Operating Costs , Trade Payables & Sales on Net Income in the Food & Beverage Company Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange for the Period 2015-2018." *Budapest International Research and Critics Institute - Jorunal* 3:2686-99.
- Dr. Rukin, S. P. M. S. 2021. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI*. Jakad Media Publishing.
- Heru, Winarsih, and Karsiati. 2019. "Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang,Serat Acitya- Jurnal Ilmiah Untag Semarang Issn: 2302-2752,Vol. 8 No. 1." *Serat Acitya-Jurnal UNTAG Semarang* 8(1):1-19.
- Irma. 2023."Pengelolaan BOPRA Nurul Huda."
- Larasati, Putri Ayu, and Nur Handayani. 2021. "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(7):1-16.
- Nanang Fattah. 2008. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris." *Jurnal Pendidikan Dasar* 2(April):417-36.
- Papilaya, J. 2022. *MANAJEMEN Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.



- Pratiwi, Indah, Lukman Solihin, Genardi Atamadiredja, and Bakti Utama. 2021. "Risalah Kebijakan." *Pusat Penelitian Kebijakan* 3(April):1-8.
- Prof. Dr. Dede Rosyada, M. A. 2020. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Prenada Media.
- Prof. DR. H. A. Rusdiana, M. M., and M. A. Dr. H. Abdul Kodir. 2022. *PENGELOLAAN MADRASAH DINIYAH KONTEMPORER*. MDP.
- Prof. DR. H. A. Rusdiana, M. M., and H. W. M. A. P. Drs. 2022. *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah*. ARSAD PRESS.
- Qhoimah, Nurul, and Erni Munastiwi. 2022. "Analysis of School Financial Management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis." *As-Sabiqun* 4(2):418-31. doi: 10.36088/assabiqun.v4i2.1777.
- Restian, A., and R. Widodo. 2019. *Pengantar PENDIDIKAN*. UMMPress.
- Ridwan, Ahmad, and Halimatun Sakdiyah. 2022. "Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor." *Hibrul Ulama* 4(1):19-27. doi: 10.47662/hibrululama.v4i1.168.
- Rozalena, Rozalena, and Muhammad Kristiawan. 2017. "Pengelolaan Pembelajaran Paud Dalam Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 2(1):76-86. doi: 10.31851/jmksp.v2i1.1155.
- Safitri, Nur. 2020. "Sumber Dan Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." *Journal Pendidikan* (February):0-14.
- Shaturaev, J. 2021. "Indonesia: Superior Policies and Management for Better Education (Community Development through Education)." *Архив Научных Исследований* (20):1-10.
- Shaturaev, Jakhongir. 2021. "Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia." *Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej Zarzadzanie* 42(1):57-65. doi: 10.17512/znpcz.2021.2.05.
- Surur, Miftahus, Ramadhan Prasetya Wibawa, Firman Jaya, Arico Ayani Suparto, Darmawan Harefa, Ahmad Faidi, Eges Triwahyuni, I. Kadek Suartama, Abdul Mufid, Agus Purwanto, and Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora. 2020. "Effect Of Education Operational Cost On The Education Quality With The School Productivity As Moderating Variable." *Psychology and Education* 57(9):1196-1205.
- Sutanto, Slamet Hari, Vindha Tyas Restyaningati, and Ervan Kusindarto. 2021. "1451-8119-2-Pb." 13(3).
- T. M. Haekal, M. P., M. A. Drs. M. Muhsin KS, M. S. Drs. M. Irfan Yusuf, M. P. Muhammad Ali Wahyudi, M. P. I. Yadi Fajri, M. P. I. Samsul Hadi, S. P. I. M. P. Siti Muawanatul Hasanah, M. P. I. Zaedun Na'im, M. P. Abdul Gafur, and M. P. Rahmad Azazi Rhomantoro. 2022. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. Media Sains Indonesia.
- Tarmizi. 2015. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui

- Bantuan Operasional Sekolah Pada Min Cempala Kuneng Kabupaten Pidie." *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 10(4):92-101.
- Trihantoyo, S. 2020. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Pustaka Aksara.
- Utami, Annisaa Dwi, and Harimukti Wandebori. 2023. "Proposed Business and Marketing Strategy for Recovering Kb Kupu-Kupu and Tk Harapan Bunda after Pandemic." *European Journal of Business and Management Research* 8(2):44-55. doi: 10.24018/ejbmr.2023.8.2.1842.